

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya.<sup>1</sup> Salah satunya adanya ilmu hukum.

Tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan di lindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hlm.9

<sup>2</sup> Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cv. Mandar Maju, 2005, hlm.1

Kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.<sup>3</sup>

Upaya menanggulangi kejahatan yang lazim dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice Sistem* (SPP/CJS). Mengingat beragamnya fungsi yang diemban oleh masing-masing institusi, maka SPP akan sulit terbentuk sehingga tidak mudah kita berbicara tentang SPP Terpadu (*integrated criminal justice system*). Hal ini disebabkan subsistem penyidikan seperti kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan berada di bawah struktur eksekutif, sementara pengadilan berada di bawah yudikatif, akan tetapi subsistem pelaksanaan putusan (eksekusi pidana) berada di bawah badan eksekutif kembali sehingga doktrin *integrated criminal justice system* hanya lebih bersifat wacana simbolik daripada masalah substansial. Dalam realitasnya lembaga-lembaga tersebut mengejar tujuan masing-masing sesuai dengan target lembaganya sendiri, sehingga prinsip *integrated* yang dikehendaki sampai saat ini tidak kunjung terwujud.<sup>4</sup>

Permasalahan lalu lintas yang selalu menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Adapun definisi kecelakaan lalu lintas

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Grafindo Persada, 2013, hlm.6-7

<sup>4</sup>M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2015, hlm.114

yang terdapat pada Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa :

“kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Adapun faktor lainnya karena kurang optimalnya penegakan hukum lalu lintas seperti kurangnya dilakukan operasi lalu lintas oleh pihak kepolisian sehingga para pengendara menyepelekan dan juga saat ini sudah banyak sekali anak-anak remaja yang belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) tetapi mereka dengan mudahnya menggunakan kendaraan baik motor maupun mobil di jalanan akibatnya ketika berkendara cenderung bersifat ugal-ugalan dimana seharusnya para pengendara lebih mengutamakan keselamatannya sendiri dan juga keselamatan orang lain.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam prakteknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya.<sup>5</sup>

Kasus-kasus kecelakaan tersebut ditangani oleh Unit Laka yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas secara umum melaksanakan penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) sampai dengan proses penyidikan dan pemberkasan, dalam praktek sehari-hari polisi

---

<sup>5</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1-2.

sebagai penyidik dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia umumnya memproses perkara sampai dengan pengadilan dengan variasi hukuman yang beragam seperti hakim dengan di dasari perdamaian yang terlebih dahulu timbul antara si pelaku dan korban sehingga vonis yang dijatuhkan ringan seperti hukuman percobaan, namun ada pula yang mengupayakan perdamaian antara pelaku dan korban yang sering dikenal dengan istilah mediasi penal.

Dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. Dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Mediasi penal merupakan *alternative* penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui ADR dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban.

Permasalahan dalam kecelakaan lalu lintas tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai pelaku dari kecelakaan lalu lintas dalam berbagai kasus kecelakaan lalu lintas juga dilakukan oleh pelaku anak yang menyebabkan luka ringan, luka berat, bahkan korban meninggal dunia.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak tidak mungkin dilakukan menggunakan peradilan yang sama seperti orang dewasa. Penyebabnya karena anak adalah generasi muda penerus bangsa yang dalam

perkembangnya masih harus dalam bimbingan dan perlindungan yang dapat mengancam masa depannya. Salah satunya dengan seorang itu melalui pembedaan akan ada “*labeling*” pada si anak di masyarakat bahwa anak adalah seorang penjahat yang dapat berpengaruh pada tumbuh kembang anak.

Maka muncul lah konsep keadilan restoratif sebagai pembaharuan dari pembedaan. Keadilan restoratif adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pembedaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimumremedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat pribadi antara orang-orang (*natuurlijkepersonen*) atau pun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan.<sup>6</sup>

Dipertemukannya pelaku dan korban kejahatan secara langsung mengubah cara pandang hukum pidana yang selama ini dikenal statis dalam menyelesaikan sengketa dengan proses dan prosedur yang tetap ke arah hukum pidana yang humanistik, karena di dalam mediasi penal fokus utamanya bukan pada pembalasan terhadap tindakan pelaku, tapi pada upaya penyembuhan dan

---

<sup>6</sup>RufinusHutahuruk, Penanggulangan Kejahatan *Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 107

perdamaian. Pertemuan antara pelaku dan korban bertujuan untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian, baik yang dialami korban, lingkungan maupun masyarakat luas.<sup>7</sup>

Selain itu, peradilan pidana sesungguhnya bukan merupakan institusi yang paling baik di dalam menyelesaikan konflik antara korban dan pelaku. Hal demikian disebabkan bahwa dalam peradilan bahwa hukuman bagi pelaku hanya sebagai pembalasan asa perbuatan tanpa sesungguhnya ada pertanggung jawaban kepada korban.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal mulai dikenal secara resmi oleh POLRI untuk pertama kalinya sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Barda Nawawi Arief menjelaskan perkembangan dan latar belakang munculnya ide mediasi penal sebagai pilihan penyelesaian perkara pidana yang

---

<sup>7</sup> Jurnal Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Jalan Balun Ijuk, Merawang, Bangka Belitung

<sup>8</sup> Jurnal Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Korban Dan Tersangka Memiliki Hubungan Keluarga (Studi Di Polres Probolinggo Kota), Arief Indra Sentanu , Prija Djatmika , Ismail Navianto, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Mediasi penal bisa digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Metode ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan saat ini sangat diperlukan, karena:

1. Diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara,
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah, dan sederhana,
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan,
4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

Mediasi penal sebagai alternatif dalam perkara pidana ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya, sehingga mediasi penal dapat digunakan sebagai upaya mewujudkan *Restorative Justice* (keadilan restoratif), *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan kesalahan yang telah mereka

perbuat. Penerapan mediasi penal sebagai upaya mewujudkan *Restorative Justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas juga memunculkan kekhawatiran antara lain dikhawatirkan munculnya kesewenang-wenangan pelaku karena menganggap mampu memberikan ganti rugi sehingga di kemudian hari dapat mengulanginya kembali dan tidak memiliki efek jera, oleh karena itu masyarakat dirasa perlu lebih memahami bagaimana penerapan mediasi penal pada suatu kecelakaan lalu lintas, mulai dari jenis kecelakaan seperti apa yang dapat di mediasi penal hingga bagaimana proses penerapan dan juga kendala dalam menerapkan mediasi penal.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang pertama. Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2017 dengan pelaku anak yang saat itu berusia 17 tahun. berinisial M.A.S.I. Saat itu pelaku mengendarai motor sekitar pukul 18.20 Wib yang melaju dari arah barat menuju kearah timur di Jalan A.H Nasution yang bertabrakan dengan penyebrang jalan yang menyebrang jalan dari arah utara menuju arah selatan yang dari karenanya korban Endang Sutrisman yang mengalami luka berat kemudian dibawa ke RSUD Ujungberung Kota Bandung dan Meninggal Dunia dalam perawatan di RSUD Ujungberung dan dalam penyelesaian perkara dilakukan melalui konsep restoratif yang dilakukan pada tanggal 14 Juli 2017.

Dalam Kasus kecelakaan lalu lintas yang kedua terjadi pada tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 dengan pelaku anak yang saat itu berusia 16 tahun dengan pelaku berinisial F.A.M yang mengendarai sepeda motor yang melaju dari arah utara ke selatan menabrak penyebrang jalan yang mengakibatkan



penyebrang jalan mengalami luka-luka kemudian dibawa ke RS. Muhammadiyah Kota Bandung kemudian meninggal dunia dalam perawatan medis RS. Muhammadiyah pengendara sepeda motor berikut yang dibonceng mengalami luka lecet.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik membuat sebuah penulisan hukum (skripsi) yang berjudul : **“Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dalam Tingkat Penyidikan Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penulis membatasi permasalahan kedalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses diversi dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak?
2. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di tingkat penyidikan?
3. Bagaimana upaya jaminan hak korban yang meninggal dunia dalam mencapai tujuan keadilan restoratif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai penerapan keadilan restoratif di dalam kasus kecelakaan lalu lintas

dengan pelaku anak dalam tingkat penyidikan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan keadilan restoratif di dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak dalam tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis peranan dari pihak kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif di dalam kasus kecelakaan lalu lintas
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penjaminan hak atas korban dalam penyelesaian masalah menggunakan keadilan restoratif di dalam kasus kecelakaan lalu lintas

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan baik bagi penulis maupun bagi khalayak banyak. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah;

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran, wawasan serta sebagai kontribusi dalam bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bagi pihak kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Untuk aparat KEPOLISIAN diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penerapan keadilan restorative.

- b. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi pihak Lembaga Kepolisian di dalam bidang hukum, terutama bagi penyidik.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan yang besar. Dasar dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-4. Dalam Alinea ke 4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Otje Salman mengatakan bahwa pembukaan alinea keempat menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansional merupakan konsep yang luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun menurun dan Abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa

aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikuler. Dalam mewujudkan bangsa yang mewariskan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun temurun tersebut, sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat telah memiliki aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sebagai pedoman kehidupan bangsa dan bernegara. Aturan-aturan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk.<sup>9</sup>

Ketentuan tersebut juga di atur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal ini memberikan pengertian bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum yang seadil-adilnya tidak memandang kaya atau miskin di hadapan hukum. Berkaitan dari kepastian hukum untuk mencapai hasil yang seadil-adilnya terdapat di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda- bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase ayat (1):

---

<sup>9</sup> H.R. Otje Salman dan Anthon F.Susanto, *Teori Hukum: Mengingat , Mengumpulkan,dan Membuka Kembali*,Refika Aditama,Bandung, 2005,hlm.158.

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Dalam Penyelesaian suatu permasalahan melalui arbitrase biasanya dilakukan di dalam kasus perdata dan mulainya arbitrase dilakukan di pengadilan. Arbitrase sebagai fasilitas disediakan oleh pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan para pihak sebelum masuk ke persidangan perdata. Berbeda dengan penyelesaian masalah pidana dengan mediasi penal bahwa penyelesaian masalah dapat dilakukan di tahapan kepolisian.

Pengecualian dalam tindak pidana, Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu:

- a. Orang yang sakit ingatan (Pasal 44)
- b. Orang di bawah umur (Pasal 45)
- c. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 45) dan
- d. melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50)

Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak hilang ingatan, serta orang tersebut telah dewasa. Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti ketika seseorang tidak mampu bertanggung jawab maka proses pertanggungjawabannya berhenti atau tidak dilanjutkan. Orang itu hanya dapat dikenakan sanksi berupa tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Pertanggungjawaban yang berhubungan erat dengan keadaan batin si pembuat.

Oleh karena itu, ada alasan yang menghapus kesalahan dalam hukum pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana disebut alasan pembenar, dan alasan yang menghapus kesalahan disebut dengan alasan pemaaf.<sup>10</sup>

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak:

“anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) ) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurangkurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak tidak di jelaskan pengertian secara jelas mengenai anak, namun langsung kepada pengertian anak yang menjadi pelaku, yaitu:

---

<sup>10</sup> Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.4 Oktober-Desember 2014

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pengertian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pengertian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Anak yang pada dasarnya adalah penerus generasi selanjutnya dan sudah berhadapan dengan hukum adalah suatu yang harus di tangani. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Dasar pembuatan konvensi hak-hak anak juga salah satunya tercantum dalamnya yaitu bahwa Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran",

Terdapat 41 Pasal substantif dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang mengakui hak asasi anak dengan menekankan bahwa hak tersebut harus dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun, semua tindakan dan kebijakan harus dilandasi pertimbangan kepentingan terbaik anak, anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan semua tindakan ditujukan bagi pemajuan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Lebih jauh, Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) memandang bahwa anak-anak tidak lagi dipertimbangkan sebagai penerima layanan atau sekedar penerima manfaat dari upaya perlindungan. Sebaliknya, anak adalah subyek dari hak dan berhak terlibat dalam tindakan yang mempengaruhi mereka. Anak harus dihormati dalam individualitas dan dalam kapasitas mereka yang berkembang terkait dengan keputusan yang relevan mempengaruhi kehidupan anak. Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) mengakui, dengan cara yang sesuai dengan kapasitas anak yang tengah berkembang anak-anak memiliki hak otonomi dan meningkat kemampuannya untuk mempengaruhi sehingga ketergantungan pengarahan, bantuan, atau campur tangan orang lain semakin berkurang. Namun pada saat yang sama, dalam semua tahapan perkembangan hidupnya, anak-anak perlu dilindungi dari eksploitasi, pelecehan, termasuk keterlibatannya dalam konflik, eksploitasi seksual atau bekerja yang membahayakan hidupnya<sup>11</sup>

Dalam Komentari Umum No 5 (2003) mengenai Langkah-Langkah Umum Mengimplementasikan KHA (*General measures of implementation for*

---

<sup>11</sup><http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2015/02/Mengenai-Hak-Anak-dan-Pengaturannya-dalam-KHA.pdf> di akses 2 Maret 2017 pukul 17.53 WIB



*the Convention on the Rights of the Child*), Komite KHA telah mengidentifikasi 4 pasal yang harus dianggap sebagai prinsip umum dan diperhitungkan dalam pelaksanaan semua pasal lainnya dari Konvensi. Keempat prinsip umum KHA ini bersifat mendasar dan penting untuk mengimplementasikan seluruh konvensi sehingga menjadi pedoman bagi setiap negara dalam menerapkan dan menginterpretasikan setiap pasal dalam KHA<sup>12</sup>. Keempat pasal ini terdiri dari:

1. Pasal 2 (Prinsip non diskriminasi) Kewajiban negara untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam Konvensi bagi setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi apapun. Prinsip non diskriminasi merupakan prinsip prinsip umum dari semua ketentuan hak asasi manusia dan merupakan bagian dari setiap Instrumen hak asasi manusia internasional. Kewajiban ini juga mensyaratkan bahwa negara-negara Pihak secara aktif mengidentifikasi setiap individu anak-anak dan kelompok anak-anak yang mungkin memerlukan tindakan khusus.
2. Pasal 3 ayat (1) (Prinsip kepentingan terbaik bagi anak) Pasal ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak. Pasal ini mengatur bahwa tindakan yang dilakukan oleh lembaga publik atau swasta yang fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, institusi peradilan, penguasa administratif atau badan legislatif harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian, prinsip ini

---

<sup>12</sup> Implementation Handbook For The Convention On The Right Child, Rachel Hodgkin and Peter Newell, 2007.

mensyaratkan bahwa langkah-langkah aktif harus dilakukan di semua tingkat baik Pemerintah, legislatif, dan peradilan. Ini artinya, setiap lembaga kenegaraan harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik secara sistematis untuk mempertimbangkan bagaimana hak-hak anak dan kepentingan anak-anak karena kehidupan anak-anak terakomodasi dalam setiap kebijakan publik yang ditetapkan.

3. Pasal 6 (Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang) Hak untuk hidup melekat pada setiap anak dan kewajiban Negara untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Dalam konteks ini, Komite Hak Anak mengharapkan bahwa Negara harus menafsirkan pembangunan dalam arti luas sebagai konsep holistik sehingga dapat mengakomodasi perkembangan anak secara fisik, mental, spiritual, moral, psikologis dan sosial.
4. Pasal 12 (Prinsip penghormatan terhadap pandangan anak) Hak anak untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak, pandangan-pandangan anak harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Prinsip ini menyoroti peran anak sebagai warga Negara yang aktif dalam perlindungan, promosi dan pemantauan terhadap upaya pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini membutuhkan prasyarat harus tersedia mekanisme fasilitatif yang sesuai kapasitas anak-anak yang tengah berkembang . Dengan demikian, partisipasi anak ini sangat penting dalam setiap proses

pengambilan kebijakan publik karena setiap kebijakan publik yang ditetapkan oleh para pengambil kebijakan akan berdampak pada kehidupan setiap anak baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.<sup>13</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana disebut juga anak nakal atau dalam istilah lain *Juvenile Delinquency*. Romli Atmasasmita di dalam bukunya memberikan pula perumusan mengenai istilah *Juvenile Delinquency* yaitu setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Di dalam Pasal 6 sampai 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, membahas mengenai Diversi untuk menyelesaikan masalah diluar pengadilan dan selama proses beracara anak akan di dampingin orang tuanya agar dapat membuat perasaan tenang, aman, dan terlindungi bagi anak yang sedang dalam pemeriksaan sehingga kegundahan yang terjadi pada diri anak dapat hilang, namun kembali pada pihak-pihak dalam kasus karena Diversi karena penyidik hanya sebagai perantara antara pihak korban dan tersangka.

Mediasi penal adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan. Ide dasar dari adanya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri,

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup>Wagiati Soetedjo Dan Melani, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama, 2013.hlm. 11

bahwa hukum pidana itu bersifat *Ultimum Remedium* yang berarti hukum pidana merupakan obat terakhir

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.<sup>15</sup>

Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.<sup>16</sup>

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 23.

<sup>16</sup> F. Anton Susanto. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta. 2004. hlm. 12

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 17

Ditetapkan dalam pasal 93 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang prasarana dan lalu lintas jalan adalah: “Suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”

Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2), antara lain;

- a. Korban mati
- b. Korban luka berat
- c. Korban luka ringan

Bahwa mediasi penal ada sebagai perwujudan hukum pidana yang baru, yang mengedepankan kepentingan dari korban hingga terjadinya *win-win solution* sebagai tujuan dari mediasi penal itu sendiri demi mewujudkannya rasa keadilan dan kemanusiaan baik bagi korban maupun tersangka. Mediasi Penal juga di lakukan di dalam kecelakaan lalu lintas termasuk kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh anak, karena dalam aturannya mengenai peradilan anak dalam berhak untuk mendapatkan keringan salah satunya dengan diadakannya mediasi penal untuk mendapatkan keadilan bagi seorang anak itu sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

Metode menurut Peter R. senn;

“Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis”.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang sebagaimana Menurut Ronny Hanitijo Soemitro;

“Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder”.<sup>18</sup>

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu:<sup>19</sup>

“suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum.”

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana penerapan mediasi penal di dalam kecelakaan lalu lintas oleh anak dilakukan kepolisian dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*<sup>20</sup>, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan konsep/teori tindak pidana, teori kewenangan, teori pemidanaan dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum dogmatis. Penelitian ini yang

---

<sup>18</sup> Peter R senn dalam Buku Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 24.

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm.11.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 11.

mengangkat masalah penerapan mediasi penal dalam kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak di lingkungan Kepolisian sebagai media penyelesaian masalah.

### 3. Tahapan Penelitian

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang dapat diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulisan kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dapat diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian normatif yang sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang berupa dokumen, buku-buku, laporan-laporan, dan arsip data sekunder yang digunakan penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu pelengkap dari bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang dengan Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu buku-buku yang berisi teori-teori dan tindak pidana yang berhubungan dengan

penyalahgunaan wewenang, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa makalah, seminar, internet, surat kabar, jurnal hukum, dan lain sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data terkait penyalahgunaan wewenang yang ditangani Polda Jawa Barat, dengan cara memperoleh data primer sebagai pendukung dan pelengkap dan penunjang data sekunder, penelitian ini dilakukan pada instansi terkait seperti lembaga kepolisian dengan pokok permasalahan, yaitu tentang penerapan mediasi penal dalam kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dilingkungan kepolisian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Tehnik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan pendekatan penelitian yang dipilih dan merupakan penerapan dari metode yang digunakan, yaitu metode *yuridis-normatif*. Dalam hal ini tehnik pengumpulan yang dilakukan dengan cara:<sup>21</sup>

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 57



- 1) Inventarisi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan proses penyidikan suatu tindak pidana.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
- 4) Penelusuran bahan melalui internet.

b. Studi Lapangan (*Field Reseach*).

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan pada instansi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dengan pokok permasalahan mediasi penal. Dan bisa dengan melakukan wawancara, wawancara adalah memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancara.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang dikehendaki dalam melakukan penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Elli Ruslina dkk, Panduan *Penyusunan Penulisan Hukum*, (Tugas Hukum) Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2009, hlm. 118.

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal yang penting dari buku-buku kepustakaan, kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang mediasi penal di dalam keelakaan lalu lintas oleh anak di lingkungan kepolisian. Dan bahan hukum sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, dan blog dalam situs-situs internet.
- b. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (*non directive interview*) menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), alat perekam data internet menggunakan *flashdisk* atau *flashdrive*.

## 6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk ditulis skripsi ini di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu:

- a. Dengan memperhatikan peraturan peraturan perundang-undangan, maka penafsiran diharapkan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Kepastian hukum, yaitu perundang-undangan yang diteliti telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum dan pemerintah berwenang.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh penulis, lokasi penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jln.Lengkong  
Dalam No. 11 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jln.Dipatiukur No.32  
Bandung.

b. Penelitian lapangan berlokasi di Polrestabes Bandung, Jalan Merdeka  
No 18-21 Kota Bandung